**MARJINALISASI MASYARAKAT PEDESAAN**

**Studi di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang**

Rica Arvenia,, Muhammad Fedryansyah, Ramadhan Pancasilawan

Program Magister Sosiologi, FISIP Universitas Padjadjaran

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

Departemen Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Padjadjaran

m.fedryansyah@unpad.ac.id

This research focuses on marginal communities in the countryside. Marginal communities who are poor, among others, are caused by the impacts of development, lack of local government attention to the survival of rural communities, shifting jobs and failure to get jobs and creating a businesses then make the community poorer. This study aims to describe the condition of poverty in marginalized communities by taking the case in Cipacing Village, Jatinangor District, Sumedang Regency. Cipacing village has the most disadvantaged families compared to other villages in Jatinangor Sub-district. Understanding of marginal communities in this study uses the marginal dimension according to Perlman, namely marginal social, marginal culture, marginal economy, and marginal politics. This study uses qualitative methods with descriptive analysis, data collection in research using interviews and secondary data such as the results of other studies, books, and other documentation. The number of informants involved in this study were 6 people who were poor families in Cipacing Village. The result of this study is that marginalized communities have indeed lost their rights since the development. In addition, development also has an impact on people's lives, especially in the field of environment and community welfare. The conclusions raised from this study include that the poor in Desa Cipacing are seen from the marginal dimension of society. From the social dimension, there are not many people in Cipacing Village involved in the development within their area. From the cultural dimension, the community is not ready when there is a shift in employment from the agricultural sector to the industrial sector. Then from the economic dimension, limitations in resources result in people being unable to fight capital ownership. Furthermore, from the political dimension the community also still cannot access their rights in development planning.

***Keywords: Poverty, Marginalization, Development.***

Abstrak

Penelitian ini memusatkan perhatian pada masyarakat marjinal di pedesaan. Masyarakat marjinal yang miskin antara lain diakibatkan oleh dampak pembangunan, kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pedesaan, pergeseran pekerjaan serta gagalnya mendapat lapangan pekerjaan dan membuka usaha menjadikan masyarakat semakin miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di masyarakat marjinal dengan mengambil kasus di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Desa Cipacing ini jumlah keluarga prasejahtera yang paling banyak dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Jatinangor. Pemahaman mengenai masyarakat marjinal dalam penelitian ini menggunakan dimensi marjinal menurut Perlman, yaitu marjinal sosial, marjinal budaya, marjinal ekonomi, dan marjinal politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara dan data sekunder berupa seperti hasil penelitian lain, buku, serta dokumentasi lain. Adapun jumlah informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 6 orang yang merupakan kepala keluarga prasejahtera di Desa Cipacing. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa masyarakat yang termarjinalkan memang kehilangan haknya sejak adanya pembangunan. Selain itu pembangunan juga berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan yang diangkat dari penelitian ini antara lain bahwa masyarakat miskin di Desa Cipacing dilihat dari dimensi marjinal masyarakat. Dari dimensi sosial, masyarakat Desa Cipacing tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan di wilayah mereka. Dari dimensi budaya, masyarakat tidak siap ketika terjadi pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri. Kemudian dari dimensi ekonomi, keterbatasan dalam sumberdaya mengakibatkan masyarakat tidak mampu melawan kepemilikan modal. Selanjutnya, dari dimensi politik masyarakat juga masih belum dapat mengakses hak-hak mereka dalam perencanaan pembangunan.

***Kata Kunci: Kemiskinan, Marjinalisasi, Pembangunan***.

**Pendahuluan**

Pembangunan yang berlangsung pesat di negara kita tidak hanya membawa dampak positif, akan tetapi juga membawa dampak negatif. Adapun dampak positif dari pembangunan adalah pembangunan yang menekankan pada kepentingan masyarakat, dalam artian pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan negatif pembangunan adalah pembangunan yang menyebabkan berbagai macam persoalan sebagai akibat dari perencanaan pembangunan yang tidak matang. Banyaknya pembangunan nyatanya membuat masyarakat membelenggu dalam kemiskinan, pembangunan bukan menjadikan solusi yang baik bagi masyarakat miskin (Suharto, 2009: 123, Usman, 2012: 56).

Distribusi penduduk miskin juga dapat ditemukan di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dimana, jumlah penduduk miskin berdasarkan kartu keluarga di wilayah ini mencapai sekitar 11 persen (Badan Pusat Statistik Sumedang). Hal tersebut secara geografis disebabkan karena wilayah Kecamatan Jatinangor berbatasan langsung dengan kabupaten lain, sehingga tenaga kerja pendatang banyak menguasai dan bekerja di Jatinangor. Sehingga, masyarakat Jatinangor kesulitan untuk mengakses sumber-sumber atau lapangan pekerjaan.

Selain itu, status Kecamatan Jatinangor yang dikenal sebagai pusat dari beberapa perguruan tinggi membuat pembangunan di wilayah ini sangat pesat. Pembangunan fisik seperti bangunan permukiman untuk kos-kosan, pusat perbelanjaan, maupun tempat usaha lainnya. Banyaknya pembangunan ternyata tidak serta merta membuat masyarakat Jatinangor terhindar dari kemiskinan. Di salah satunya desa yang ada di Kecamatan Jatinangor, yaitu di Desa Cipacing menunjukkan data mengenai jumlah keluarga prasejahtera yang mencapai angka 917. Jumlah penduduk miskin di desa ini paling banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di desa lainnya di Kecamatan Jatiangor. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa masyarakat di Desa Cipacing, mengalami marjinalisasi secara pembangunan.

Marjinalisasi masyarakat Desa Cipacing terjadi karena miskin secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan pollitik. Masyarakat desa gagal mendapatkan hak-hak mereka sehingga jumlah kemiskinan masih sangat banyak di Desa Cipacing ini. Pesatnya pembangunan tak mengurai jumlah kemiskinan, mayarakat miskin hanya bisa bergantung pada pendapatan yang tidak tetap seperti bekerja di sektor industri, sebagai buruh yang tidak terikat. Tentunya kondisi tersebut berdampak pada pendapatan dan kondisi ekonomi rumah tangga. Kurangnya perhatian dan program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik maka menjadikan masyarakat desa marjinal tidak bisa mempunyai kekuatan selain menunggu.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup,dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup (Scott, 1981 dalam Sahdan, 2005 : 13 dan Rini 2015 : 22). Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas maka, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menggambarkan kondisi dari masyarakat yang termarjinalkan di desa, khususnya di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk menganalisis secara deskriftif kondisi kemiskinan masyarakat pedesaan yang disebabkan oleh urbanisasi masyarakat di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dalam pengumpulan data ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu melakukan studi literatur dari jurnal dan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk membuat landasan teori kemudian nantinya untuk menjawab dari suatu permasalahan penelitian. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada 6 orang informan, yaitu masyarakat miskin di Desa Cipacing. Untuk pemilihan informan penelitian maka penelitian ini menggunakan teknik purposive, yakni pemilihan informan didasarkan pada kesesuaian tujuan penelitian.

**Teori Marjinal Janice Perlman**

Pengertian marjinal menurut Perlman ini dibedakan menjadi empat dimensi yaitu marjinal secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Marjinalisasi sosial menjadi diskusi tentang terpinggirkannya masyarakat secara sosial, sedangkan marjinalisasi budaya adalah percakapan atau diskusi tentang *otherness.* Kemudian, marjinalisasi ekonomi berubah menjadi perampasan, kerentanan dan pemikiran ulang mata pencaharian dan asset. Sedangkan marjinalisasi politik menjadi dialog tentang kurangnya suara klaim kewarganegaraan dan hak (Perlman, 2010:152).

Marjinal secara sosial dimana dalam suatu masyarakat terpinggirkan dengan hidup terisolasi, karena mereka dianggap tidak mampu ataupun tidak diberikan ruang untuk mengakses sumber daya. Masyarakat yang terpinggirkan mencakup mereka yang lahir di sebuah kota metropolitan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk, taraf hidup yang rendah serta akses layanan terbatas (Perlman, 2010:155). Kemudian marjinal secara budaya dipahami sebagai tindakan diskriminasi dalam hal akses publik yang menyangkut soal suku, agama, ras, adat (SARA). Perlman lebih juga menekankan pada tindakan diskriminasi yang alami oleh masyarakat berdasarkan warna kulit dan kaum urbanisasi. Tindakan berdasarkan warna kulit yang terjadi adalah dalam hal mendapatkan pekerjaan dan perumahan. Sementara kaum urban yang dijelaskan Perlman yakni adanya perbedaan akses antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang, selain itu dapat digambarkan pada tempat tinggal di perkotaan. Adanya perbedaan dalam hal tempat tinggal, dimana para penduduk asli menempati tempat-tempat pusat kota, sedangkan para pendatang bermukim di pinggiran kota yang notabene nya sebagai kawasan illegal untuk dihuni (Perlman, 2010: 153).

Selanjutnya marjinal secara ekonomi Perlman menilai bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, tidak memiliki pekerjaan, dan pengangguran sehingga berujung pada kemiskinan merupakan kategori marjinal secara ekonomi. Masyarakat yang marjinal secara ekonomi ini cenderung berpengaruh pada status sosial dan akses politik. Meskipun masyarakat marjinal belum tentu masyarakat miskin begitu juga sebaliknya, akan tetapi termarjinalkan secara ekonomi akan berdampak pada marjinalisasi pada bidang lain. Sementara marjinalisasi secara politik, Perklman menyatakan jika terdapat pembatasan untuk bersuara. Artinya bahwa masyarakat marjinal tidak diberi ruang untuk terlibat aktif dalam proses politik. Akibat dari terpinggirkannya dari proses politik, mereka akhirnya memilih untuk bersikap apatis dalam segala hal yang berkaitan dengan politik. Bagi mereka keadaan politik yang terjadi baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan bisa membantu mereka keluar dari kemiskinan. Tak hanya itu, kesadaran dan pengetahuan politik yang rendah juga menyebabkan masyarakat miskin untuk enggan membicarakan persoalan politik. Ketidaktertarikan dalam politik ini kemudian membuat mereka bersikap apatis. Hal lain yang berkaitan dengan marjinal secara politik ialah soal hak. Hak menjadi penting untuk dijamin oleh negara, namun apabila hak ini tidak dapat terpenuhi oleh negara, maka mereka terpinggirkan, dimanipulasi, dan ditekan. Perlman menyebutkan jika masyarakat yang secara haknya terpenuhi bahkan ditindas maka mereka termarjinalkan.

**Hasil Dan Pembahasan**

Masyarakat Indonesia kurang lebih 80% tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian yang bersifat agraris. Masyarakat pedesaan yang agraris biasanya dipandang oleh orang-orang kota sebagai masyarakat tentang damai, harmonis yaitu masyarakat yang adem ayem. Sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan, keramaian dan kericuhan atau kekusutan pikiran. Masyarakat desa juga merupakan masyarakat yang mempunyai hubungan kekerabatan yang harmonis, tak jarang satu desa biasanya banyak dihuni oleh kerabat. Tingkat solidaritas yang tinggi membuat masyarakat desa jauh dari keributan dan rasa perduli antar sesama begitu besar (Imran, 2010).

Masyarakat kota dilihat sebagai masyarakat dengan berbagai macam mata pencaharian/pekerjaan. Selain itu juga dikenal dengan gaya hidupnya, dimana pola kehidupan masyarakat perkotaan membuat masyarakat cenderung menjadi pribadi yang individual. Masyarakat kota cenderung konsumtif dikarenakan memang pada dasarnya semua yang dibutuhkan hampir rata-rata ada di perkotaan dan membuat masyarakat kota mengikuti semua gaya hidup tersebut pasti didukung oleh keadaan ekonomi yang cukup (Lestari, 2009).

Gambaran mengenai kondisi masyarakat kota dan desa tersebut juga ada di masyarakat Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Desa ini merupakan desa yang jumlah kemiskinannya belum terurai. Masyarakat Desa Cipacing merupakan masyarakat homogen dilihat dari agama, ras, dan budaya. Masyarakat desa cipacing dulunya bekerja di sektor pertanian akan tetapi sector pertanian saat ini bukanlah pekerjaan yang menguntungkan lagi. Pergeseran pekerjaan mulai terjadi seiring meningkatnya kebutuhan. Lahan-lahan pertanian yang tak menguntungkan kemudian dijual dengan harapan dapat membuka usaha baru. Namun kenyataannya tak semudah itu, masyarakat justru mengalami pengangguran dan ada bekerja sebagai buruh industri tak terikat. Masyarakat yang tadinya dicirikan sebagai masyarakat desa, mulai bergeser ke arah masyarakat kota. Akan tetapi, pergeseran ini tidak tercapai.



Gambar 1. Proses Transisi Masyarakat

Keadaan semacam ini merupakan keadaan transisi, tentunya peran pemerintah sangat penting untuk mengurangi kemiskinan di Jatinangor, masyarakat kota (kapitalis), masyarakat desa (marjinal). Kedua masyarakat ini perlu perhatian dari pemerintah agar masa transisi berjalan dengan baik. Saat ini pergeseran sosial kultural masyarakat terutama masyarakat pedesaan mengalami bahwa perubahan tatanan kehidupan masyarakat sangat diakibatkan oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi, serta kemampuan, keinginan masyarakat untuk berpikir maju. Perkembangan yang terjadi dalam seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan lain sebagainya, akan berimplikasi pada tatanan kehidupan masyarakat.

Ada hubungan yang dibangun antara pemerintah dan pasar dalam upaya membuat relasi ekonomi. Guna memunculkan intensif pertumbuhan perekonomian, yang cenderung memarjinalkan masyarakat miskin kota dan desa, pemerintah menggunakan regulasi untuk memperbaiki kebijakan yang akan dihadirkan. Sebagai proses perubahan tentunya kota dan desa berada pada keadaan transisi dimana peralihan tersebut membuat masyarakat desa semakin tertinggal. Letak kawasan Jatinangor berbatasan langsung dengan kota lain, tak jarang membuat para pendatang menguasai Jatinangor dan bekerja di kawasan Jatinangor. Masyarakat pribumi semakin terpinggirkan hak-hak masyarakat perlahan-lahan direbut dengan cara digantikan sejumlah uang, dengan modal pendidikan rendah, masyarakat setempat tidak berpikir panjang ketika menjual aset-aset yang mereka miliki. Dampak pembangunan telah merenggut masa depan masyarakat di Desa Cipacing.

Masyarakat Desa Cipacing gagal mendapat kesempatan kerja, kemiskinan membuat masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Pembangunan yang dibuat oleh para pemilik modal tak banyak memberikan lapangan pekerjaan. Banyak kompleks perumahan-perumahan yang ada di sekitar wilayah Desa Cipacing menunjukkan bahwa pembangunan tak memerangi kemiskinan akan tapi membuat bencana berdatangan. Banjir menjadi bencana yang dialami oleh masyarakat desa. Selain itu, pencemaran sungai sebagai dampak dari pembuangan limbah industry dan rumah tangga juga mengakibatkan berkurangnya kualitas air bersih.

Mengurai kemiskinan seharusnya juga tidak harus bergantung pada pemerintah. Pemanfaatan sumber daya juga dapat mengurangi kemiskinan, akan tetapi masyarakat di Desa Cipacing tidak dapat memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang mereka miliki. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya justru mengakibatkan persaingan yang semakin ketat. Masyarakat desa juga tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup ketika terjadi pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor industri. Kondisi ini membuat masyarakat di Desa Cipacing semakin miskin dan termarjinalkan.

**Kesimpulan**

Masyarakat miskin yang termarjinalkan di Desa Cipacing dapat dilihat dari dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dari dimensi sosial, masyarakat Desa Cipacing tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan di wilayah mereka. Pembangunan yang terjadi justru menimbulkan permasalahan seperti bencana banjir. Dari dimensi budaya, masyarakat tidak siap ketika terjadi pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri. Masyarakat masih menganut budaya pertanian yang berbeda dengan budaya di masyarakat industri. Dari dimensi ekonomi, keterbatasan dalam sumberdaya mengakibatkan masyarakat tidak mampu melawan kepemilikan modal. Mereka terpaksa menjual aset-aset yang mereka miliki kepada para pemilik modal yang berasal dari luar. Selain itu, dari dimensi politik masyarakat juga masih belum dapat mengakses hak-hak mereka dalam perencanaan pembangunan.

**Daftar Pustaka**

Imran,H,A. 2010. *Literasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Masyarakat Pedesaan*. Peneliti Madya Bidang Studi Komunikasi dan Media pada BPPKI Jakarta.

Lestari,E,W, et.al. 2009. *Konsumsi Kopi Masyarakat Perkotaan dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh: Kasus di Kabupaten Jember*. Pelita Perkebunan vol 25 no 03.

Rini,S,A, et.al. 2015. *Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga.* Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Vol 01 No 02.

Sahdan, G. 2005. *Menganggulangi Kemiskinan Desa*. Artikel‐Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan. Yogyakarta.

Suharto, 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditaman.

Usman, 2012. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Perlman, J. 2010. *Pavela : Four Decades Of Living On The Edge In Rio The Janeiro*. Oxford: Oxford University Press.